

INDEKS KINERJA HAM

SETARA INSTITUTE, 12 DESEMBER 2016

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Pada 10 Desember 2016, warga dunia merayakan Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Tepatnya 68 tahun yang lalu, 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi naskah acuan bagi setiap negara di dunia untuk memperlakukan manusia secara bermartabat dengan menghargai integritas manusia dan seperangkat hak-hak yang melekat.
- Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional dan Evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia, untuk ketujuh kalinya SETARA Institute menyelenggarakan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja HAM di Indonesia, 2016.
- Evaluasi ini diharapkan menjadi acuan perbaikan kinerja pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang menjadi kewajiban generik negara.

Tujuan

- Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute.
- Melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakkan HAM.
- Menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Metodologi

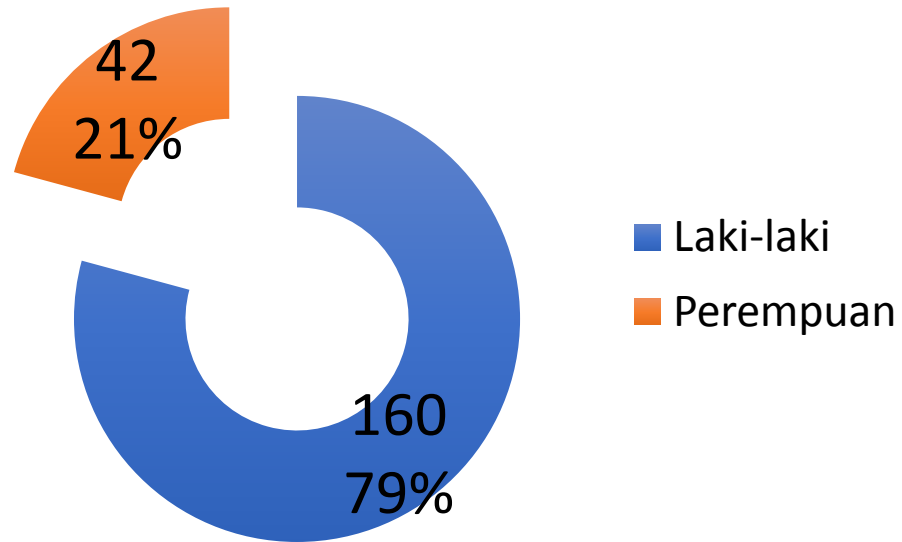
- Pendekatan: Survey
- Metode Sampling: Purposive sampling, dengan menetapkan 202 responden ahli (akademisi, peneliti, aktivis, tokoh masyarakat).
- Metode pengambilan sampel: purpose sampling yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sesuai dengan topik penelitian.
- Teknik pengumpulan data: menggunakan angket/kuesioner yang dikoleksi berbasis web (web based survey)
- Skala pengukuran indeks persepsi: 0-7, 0= skor terendah, 7= skor tertinggi, 4 = skor moderat
- Lokasi 19 propinsi
- Waktu Survei: 5 November - 5 Desember 2016

8 Variabel Pengukuran

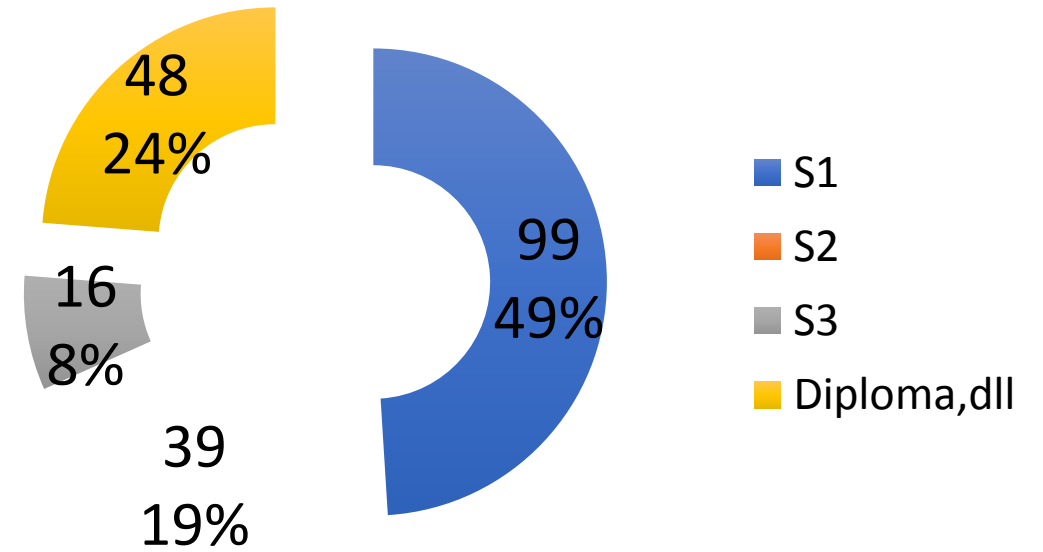
- Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
- Kebebasan Berekspresi dan berserikat
- Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
- Hak Rasa Aman Warga & Perlindungan Warga Negara
- Penghapusan Hukuman Mati
- Penghapusan Diskriminasi
- Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- RANHAM dan Kinerja Lembaga HAM

DEMOGRAFI

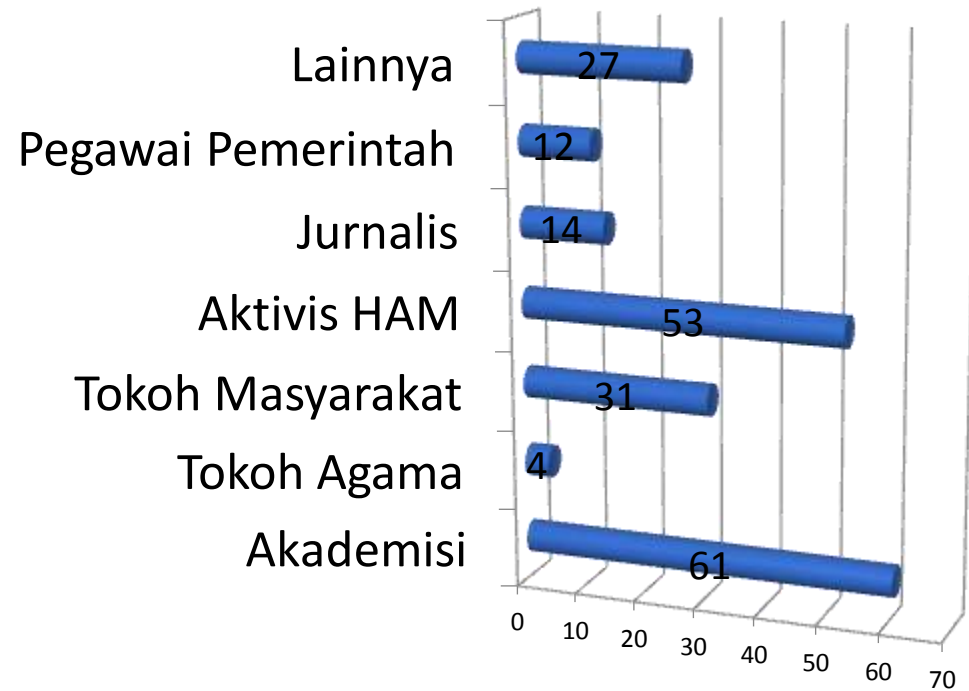
Jenis Kelamin Responden



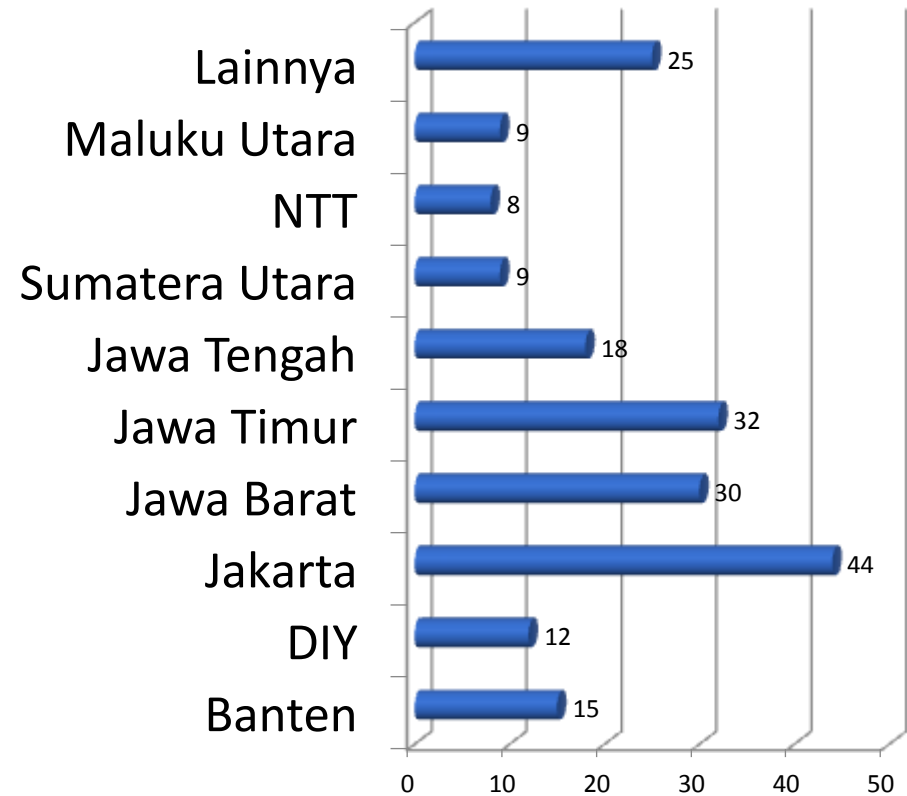
Pendidikan Kelamin Responden



Profesi Responden



Domisili Responden

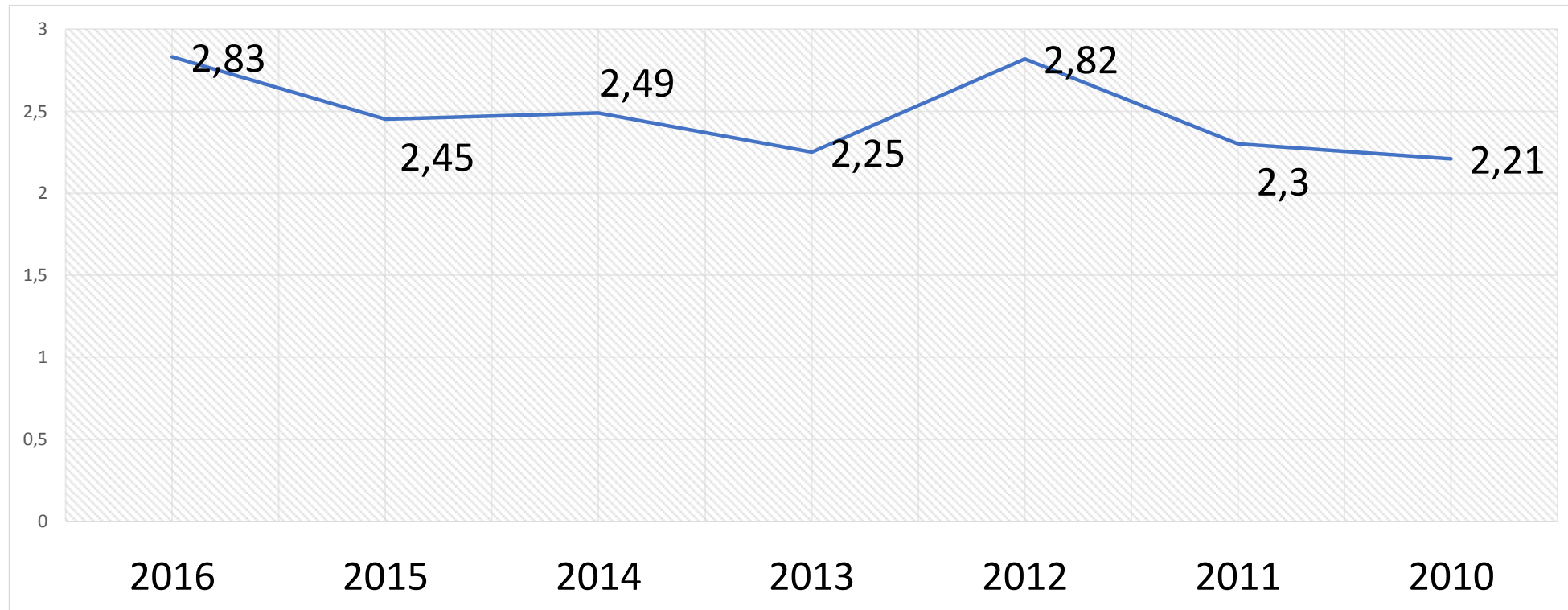


TEMUAN

Tabel: Rekapitulasi Indeks Kinerja HAM 2015-2016

No	Variabel	Score		Trend
		2015	2016	
1	Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu	1.72	1.99	+0.27
2	Kebebasan Berekspresi dan Berserikat	2.18	2.1	-0.08
3	Kebebasan Beragama/Berkeyakinan	2.57	2.47	-0.1
4	Rasa Aman Warga dan Perlindungan Warga Negara	2.47	3.32	+0.85
5	Penghapusan Hukuman Mati	1.99	2.68	+0.69
6	Penghapusan Diskriminasi	2.86	3.31	+0.45
7	RANHAM dan Kinerja Lembaga HAM	2.59	3.38	+0.75
8	Pemenuhan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3.22	3.36	+0.14
		2,45	2,83	+0,38

Grafik : Akumulasi Skor Indeks 7 Tahun Terakhir



Analisa Skor

- Indeks HAM pada 2016 **cenderung meningkat dari 2,45 menjadi 2,83.** Kenaikan 0,38 poin tidaklah signifikan secara statistik. Karena itu mengacu pada indeks HAM 2016 kondisi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM cenderung naik tapi tidak signifikan.
- Pada survei 2016, terdapat **2 variabel**, yakni Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Kebebasan Bereskrpresi dan Berserikat **cenderung menurun.** Sedangkan **6 variabel lainnya**, seperti Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Hak Rasa Aman Warga & Perlindungan Warga Negara, Penghapusan Hukuman Mati, Penghapusan Diskriminasi, Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya, RANHAM dan Kinerja Lembaga HAM **cenderung naik.**
- Artinya, sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK bekerja, pda bidang hak asasi manusia tidak menunjukkan kemajuan. Kepemimpinan Jokowi masih lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pada saat yang bersamaan mengesampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya pada bidang hak sipil dan politik.

Variabel 1: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: 1.72 (2015) → 1,99 (2016) naik 0,27

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
1.1	Penghilangan Orang Secara Paksa	1,5	1,97	+0,47
1.2	Peristiwa 65	1,72	1,91	+0,19
1.3	Kasus Tanjung Priok	1,72	2,05	+0,33
1.4	Kasus Trisakti, Semanggi I dan II	1,81	1,82	+0,01
1.5	Kasus Pembunuhan Munir	1,91	1,93	+0,02
1.6	Kasus Wamena-Wasior	1,87	1,83	+0,04
1.7	Prakarsa Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi	1,67	2,41	+0,74

Analisa Skor pada Variabel Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dari 1,72 (2015) menjadi 1,99 pada 2016

→ NAIK 0,27

- Kenaikan skor pada variabel ini didukung oleh rencana pemerintah menyelesaikan perkara pelanggaran HAM masa lalu, meski hingga kini belum terwujud. KKR Aceh justru telah terbentuk dan mulai bekerja, dipersepsi sebagai langkah awal penyelesaian kasus.
- Sementara, pasca putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang perintah membuka dokumen TPF Munir, meski dinyatakan hilang oleh Setneg, cukup memberi sentimen positif meski tidak signifikan. 0,27.
- Namun semua prakarsa itu nyaris pupus, saat perombakan kabinet II, Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menkopolhukam dan tidak menyentuh posisi Jaksa Agung M. Prasetyo meski tidak punya prestasi. Dua pejabat penentu pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, dipersepsi dapat menjadi penghalang penuntasan 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Variabel 2: Kebebasan Bereskrpresi dan Berserikat: 2,10

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
2.1	Kekerasan terhadap Jurnalis	2,31	2.15	-0.16
2.2	Kriminalisasi Kerja Jurnalis	2,31	2.41	-0.1
2.3	Perlindungan Pembela HAM	2,16	1.18	-1.06
2.4	Pembatasan Kebebasan Berserikat	2,18	2.68	+0.5
2.5	Prakarsa Negara	2,16	2.05	-0.11
2.6	Tahanan Politik	2,10	2.11	+0.01

Analisa Skor pada Variabel Kebebasan Berekspresi dan Berserikat: 2,18 (2015) → 2,10 (2016) → turun 0,08

- Penurunan skor pada variabel ini dipicu oleh meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi melalui praktik kriminalisasi terhadap aktivis HAM, warga Papua, dan jurnalis.
- SETARA Institute mencatat Papua menjadi daerah darurat Kebebasan berekspresi dengan membukukan 29 orang mengalami kriminalisasi, 2.397 orang ditangkap saat berunjuk rasa, 13 orang dibunuh, 68 orang ditembak, dan 2 peristiwa percobaan pembunuhan.
- Di luar Papua, kriminalisasi aktivis meningkat dari **23 peristiwa pada 2015 menjadi 32 peristiwa pada 2016** dengan korban 213 aktivis.
- Sementara, prakarsa negara mengesahkan revisi UU ITE telah kemungkinan memberikan sentimen negatif pada iklim kebebasan di masa yang akan datang.

- Pada tahun 2016, SETARA mencatat ada 46 peristiwa kekerasan terhadap jurnalis.
- Terkait tahanan politik, Menurut data yang dilansir *Papuan Behind Bars (2016)* tercatat hingga bulan Maret 2016 ada 32 tahanan politik Papua yang belum dibebaskan. Sedangkan Menurut monitoring SETARA Institute (Sept 2016) Tapol Papua yang masih dalam tahanan terkini berjumlah 41 orang.

Variabel 3: Kebebasan

Beragama/Berkeyakinan: 2,47

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
3.1	Kebebasan mendirikan tempat ibadah	2,54	2.21	-0,33
3.2	Perlindungan Kebebasan beragama/berkeyakinan terhadap agama/keyakinan minoritas	2,43	2.27	-0,16
3.3	Regulasi negara yang membatasi Kebebasan beragama	3,02	3.08	+0,06
3.4	Penanganan/peradilan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama/keyakinan minoritas	2,29	2.32	+0,03

Variabel Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dari 2,57 menjadi 2,47 pada 2016

→ TURUN 0,10

- Pada variabel kebebasan beragama/berkeyakinan berbagai pelanggaran telah berkontribusi membuat persepsi ahli semakin negatif terhadap tanggung jawab negara memenuhi kewajibannya untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak untuk bebas beragama/berkeyakinan. Data per 8 Desember, terdapat 182 pelanggaran kebebasan beragama. Pada 2015 lalu, hingga 31 Desember terdapat 197 peristiwa. Angka ini dipastikan bertambah, karena menjelang Natal dan Tahun Baru, aksi-aksi intoleransi semakin menyebar ke banyak daerah.
- Selain daftar peristiwa yang menggambarkan tidak ada kemajuan apapun pada pemerintahan Jokowi-JK, aksi intoleransi semakin menyebar luas di tahun 2016. Selain penetapan Basuki Tjahaja Purnama menjadi tersangka penodaan agama, yang merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi/berpendapat, kriminalisasi terhadapnya justru memicu perluasan aksi intoleransi. Kasus pembubaran kegiatan ibadah KKR di Sabuga Bandung adalah salah satu contoh Ahok effect yang semakin destruktif.
- Peristiwa lain yang bisa dicatat adalah pembongkaran masjid JAI di Kendal, pengusiran JAI di Bangka, pembakaran pemukiman Gafatar, penangkapan pimpinan Gafatar, pelarangan pendirian tempat ibadah gereja di Pasar Minggu, dll.

Variabel 4: Rasa Aman Warga dan Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri: 3,32

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
4.1	Konflik Sosial	2,16	3,17	+1,01
4.2	Pemberantasan Terorisme	2,18	3,94	+1,76
4.3	Kondisi Keamanan	2,16	3,71	+1,55
4.4	Perlindungan TKI	2,54	2,65	+0,11
4.5	Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri	3,29	3,11	+0,18

Variabel Rasa Aman dan Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri dari 2,47 (2015) menjadi 3,32 pada 2016

→ NAIK 0,85

- Sejalan dengan trend kenaikan skor pada variabel ini, pada tataran praktis juga terdapat beberapa peristiwa yang memberikan sentimen positif. Respon cepat pemerintah terhadap beberapa fenomena seperti pasca teror bom Sarinah dan penanganan beberapa ancaman bom memberikan efek positif.
- Klaim pemerintah menyelesaikan kasus pengaduan perlindungan TKI di luar negeri. Dari 26.866 kasus yang diterima BNP2TKI, sejumlah 24.712 kasus berhasil diselesaikan. Sisanya 721 kasus dalam proses validasi dan tindak lanjut, 1.077 dalam proses di unit kerja BNP2TKI, dan 356 kasus dalam proses di luar BNP2TKI. Sementara, Migrant Care (2016) mencatat 271 TKI saat ini menghadapi ancaman hukuman mati.
- Keberhasilan pemerintah dalam menangani penyanderaan juga tampaknya diapresiasi oleh responden. Penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terjadi sebanyak 6 kali dalam setahun ini. Meskipun demikian, pemerintah dianggap gagal dalam melakukan strategi pencegahan, karena terus berulang.

Variabel 5: Penghapusan Hukuman Mati:2,68

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
5.1	Vonis Mati	1,81	2,57	+0,76
5.2	Ekseskusi Mati	1,91	2,64	+0,73
5.3	Regulasi Negara	2,25	2,82	+0,57

Variabel Penghapusan Hukuman Mati dari 1,99 menjadi 2,68 pada 2016

→ NAIK 0,69

- Variabel penghapusan hukuman mati mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Respon ini muncul dengan melihat fenomena kehati-hatian Pemerintah dalam melaksanakan hukuman mati tahap III, belajar dari pengalaman hukuman mati tahap I dan II.
- Kemudian, trend positif juga sejalan dengan jumlah vonis mati yang menurun dari **46 vonis pada 2015 menjadi 38 vonis** pada 2016. Komitmen mengubah pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dalam revisi KUHP juga memberikan sentimen positif.
- Tetapi skor pada variabel ini tetap buruk karena pemerintah Jokowi justru bersemangat menambah ketentuan hukuman mati, khususnya pada kasus Narkoba.

Variabel 6: Penghapusan Diskriminasi: 3,31

No.	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
6.1	Diskriminasi Perempuan	2,89	3,46	+0,57
6.2	Disriminasi Ras dan Etnis	2,83	3,17	-0,34

Variabel Penghapusan Diskriminasi dari 2,86 menjadi 3,31 pada 2016 → Naik 0,45

- Trend kenaikan ini sejalan dengan beberapa upaya pro-aktif pemerintah dalam menyikapi fenomena diskriminasi terhadap perempuan, ras, dan etnis.
- Pertama, pemerintah menyepakati RUU penghapusan kekerasan seksual dalam Prolegnas 2016. Kedua, Kapolri dan pemerintah pro aktif dalam melakukan pencegahan atas konflik ras dan etnis, misal membuat MoU Kapolri dengan PBNU terkait konflik sosial dan *hate speech* serta respon cepat atas sentimen SARA yang mengiringi penetapan sdr. Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka penodaan agama.
- Meski demikian, pemerintah masih memelihara praktik diskriminasi terhadap Rakyat Papua, seperti penangkapan sekitar 3000an aktivis pro demokrasi Papua, pembunuhan, dan respon yang berlebihan terhadap aksi rakyat papua.
- Xenophobia (kebencian terhadap orang asing) juga meningkat seperti banyak disampaikan secara terbuka baik melalui mimbar terbuka maupun media sosial, khususnya terhadap etnis Tionghoa.

Variabel 7: RANHAM dan Kinerja Lembaga HAM: dari 2,59 → 3,38 naik 0,75

No	Indikator	Score		Ket
		2015	2016	
7.1	Pembentukan dan Penguatan Panitia RANHAM	2,54	3,29	+0,75
7.2	Pengesahan Instrumen-instrumen HAM	2,43	3,32	+0,78
7.3	Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan dengan nilai-nilai HAM	3,02	3,24	+0,22
7.4	Pendidikan HAM	2,29	3,12	+0,83
7.5	Penerapan Norma dan Standar HAM	3,27	3,12	+0,15
7.6	Laporan HAM kepada PBB	2,18	3,09	+0,91
7.7	Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	2,16	3,20	+1,04
7.8	Kinerja Komnas HAM	2,54	3,53	+0,99
7.9	Kinerja Komnas Perempuan	2,43	4,07	+1,64
7.1	Kinerja Komisi Perlindungan Anak (KPAI)	3,02	3,89	+0,87

Variabel 8: Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: 3,22 → 3,36 naik 0,14

No	Indikator	Score		Trend
		2015	2016	
	8.1 Kesehatan	4,18	3,72	-0,46
	8.2 Pendidikan	4,12	3,83	-0,29
	8.3 Lapangan Kerja	4,22	3,02	-1,20
	8.4 Kebebasan Ekspresi Budaya	2,16	3,81	+1,65
	8.5 Pemajuan Masyarakat Adat	2,54	3,30	+0,76
	8.6 Ketersediaan Pangan	2,43	3,00	+0,57
	8.7 Perumahan	3,02	3,21	+0,19
	8.8 Penghidupan yang layak	2,29	3,02	+0,73
	8.9 Jaminan Sosial	3,27	3,42	+0,15
	8.1 Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas	4,22	4,50	+0,28
	8.11 Perlindungan Anak	3,70	2,45	-1,25
	8.12 Lingkungan Hidup	2,54	2,98	+0,45

TERIMA KASIH

Kontak Narasumber:

- **Ahmad Fanani Rosyidi**, Peneliti Hak Asasi Manusia, Setara Insitute: 081316491199
- **Bonar Tigor Naipospos**, Wakil Ketua Setara Institute: 0811819174